

# ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) MELALUI METODE E-WARUNG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dian Forensa<sup>1)</sup>; Dhika Alfatah<sup>2)</sup>; Faridah<sup>3)</sup>; Novi Rahayu<sup>4)</sup>

<sup>1)2)3)4)</sup> Program of Public Administration Publik, STIA Bengkulu

<sup>1)2)3)4)</sup> Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: <sup>2)</sup> [Dhikaalfatah8@gmail.com](mailto:Dhikaalfatah8@gmail.com)

## ARTICLE HISTORY

Received [07 Mei 2024]

Revised [10 Juni 2024]

Accepted [31 Juli 2024]

## KEYWORDS

Analisis, Metode E-warung, Kemiskinan

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## ABSTRAK

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan sudah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang dilihat dari aspek komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM ( keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang belum megetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan. Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dan E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

## ABSTRACT

The type of research conducted is qualitative research, data collection techniques used are interviews, observations, and documentation. And the data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusions. The researcher concluded that the process of implementing the non-cash food assistance program (BPNT) through the E-Warung method in overcoming poverty has been carried out effectively and in accordance with the rules seen from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on direct observation to the research location and interviews with KPM (beneficiary families). There are still obstacles faced at the communication or socialization stage because the community still needs supervision so that there are still people who do not know about the mechanism for implementing assistance. And the facilities and infrastructure in Padang Ulak Tanjung village used in the implementation of the non-cash food assistance program (BPNT) are still very lacking and the distance between KPM houses and E-Warung is far so that KPM feels difficulty when taking assistance.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah Negara, Pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah bertanggung jawab atas pangan yang cukup dan bermutu, sesuai dengan kemampuan dan kesangupan masyarakatnya. Negara bertanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan sistem jaminan sosial yang dilandasi oleh konstitusi baik secara internasional maupun

nasional (Suharto, 2005:156). Karena jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memiliki banyak masalah – masalah yang ada di masyarakat, diantaranya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang dihadapi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan - keadaan dimana individu/kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup ekonomi.

Berdasarkan undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa “ fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara “ serta pasal 2 “ negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia “ dalam pelaksanaannya, berbagai upaya sudah banyak dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan cara mengeluarkan program-program sosial. Salah satu program yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program yang dikeluarkan pemerintah sebagai tindak lanjut dalam mengatasi mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2017, yang telah diatur pada kementerian sosial No. 11 Tahun 2018 tentang program bantuan non tunai serta praturan presiden nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT). Bantuan pangan non tunai (bpnt) yang bersumber dari Anggaran Pusat atau APBN. Kemudian dikelola oleh kementerian sosial dan dilimpahkan pada tingkat kabupaten/kota yang menjadi kewenangan daerah untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Awalnya, program BPNT merupakan pengganti program Beras Sejahtera (Rastra) yang bermasalah. Penggantian program Rastra dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di karena munculnya berbagai dinamika dimana banyaknya kritik yang masuk dari masyarakat penerima Raskin atau Rasta, yang mana kualitas dari beras yang buruk, dampaknya terhadap pasar beras lokal dan penentuan sasaran program yang tidak efektif. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Disalurkan secara non tunai kepada Keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulan melalui mekanisme rekening elektronik. Hanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dari tempat yang telah berkerja sama dengan bank Himbara atau sering disebut dengan E-Warung.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan pemerintah kepada KPM tanpa uang tunai setiap bulan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) awalnya akan menerima 110.000 rupiah. / KPM, setelah itu dilakukan penggandaan. yaitu 150.000 Rupiah dan saat ini menjadi 200.000/KPM per bulan melalui Mekanisme Rekening Elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk membeli sembako di tempat yang bermitra dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), biasa disebut dengan E-Warung. E-Warung (warung elektronik gotong royong) ialah penyalur bantuan non tunai bagi warga kurang mampu. Dengan sistem ini setiap bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai akan menggunakan sistem perbankan.(suci megawatt, 2020). E-Warung (warung elektronik gotong royong) tidak hanya sebagai tempat penyaluran bantuan sosial membeli kebutuhan bahan pokok, E-warung juga berfungsi sebagai mini automatic teller machine (ATM) yang melayani pencairan belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban ekonomi dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan bantuan sembako yang bermanfaat agar mereka dapat mengkonsumsi makanan yang tepat dan mendapatkan gizi yang baik. Tindakan yang dilakukan pemerintah melalui BPNT dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat rentan. Manfaat yang diterima masyarakat melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (bpnt) yaitu: 1). Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memenuhi kebutuhan pangannya. 2). Memberikan pola makan yang lebih seimbang kepada Keluarga Unggulan (KPM). 3). Penyempurnaan target dan waktu penerimaan bantuan sembako untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 4). Memberikan pilihan dan kontrol keluarga yang disukai untuk memenuhi kebutuhan pembayaran. Dalam kenyataannya tidak selamanya kebijakan publik itu mencapai sasaran setelah dilaksanakan, walaupun sudah dilaksanakan sedemikian rupa. Karena pada pelaksanaannya banyak sekali masalah yang muncul dengan berbagai hal yang kompleks, yang tidak mudah untuk dihilangkan. Sebagai sebuah rencana secara terpusat. Dalam pelaksanaannya terdapat aspek dan pihak yang terkait. Dalam kaitannya itu tidak tertutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari peraturan pada saat pelaksanaan program.(Wibawa Dkk, 1994).

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Analisis

Menurut Sugiyono analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Nasution Analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kinerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap penelitian harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan lain oleh penelitian yang berbeda. Definisi Analisis secara umum adalah memecahkan ide-ide atau masalah terhadap suatu dari yang terkecil secara perbagian hingga sedetail mungkin untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

### **Pengertian Implementasi**

Implementasi menurut Dunn (2003:132), ialah pelaksanaan penggadilan aksi – aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Kebijakan yang telah dibuat dan direkomendasikan oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwasannya kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya.

Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi sebagai “ those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision” (tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individual/ pejabat- pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Model implementasi kebijakan yang bersifat top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation” terdapat empat aspek - aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. **Komunikasi**  
Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. **Sumber Daya**  
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People”. Edwards III (1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies”. Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator - indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan.
3. **Disposisi**  
Menurut Edward III dalam Winarno (2005: 142-143) mengemukakan : “kecenderungan – kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.
4. **Birokrasi**  
Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus - kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi”.  
“Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan - keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan - tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan dilevel warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat di katakan berhasil.

### **Program Bantuan Pangan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial sembako yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Nama Fakir Miskin yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli makanan dari pedagang grosir atau disebut e-warung (warung koperasi elektronik) di tempat-tempat yang bekerjasama dengan bank penyalur. Salah satu program nontunai dari Program Bantuan Pangan (BPNT) adalah meringankan beban kebutuhan pangan masyarakat dan memberikan gizi seimbang yang cukup dan tepat waktu kepada Keluarga Sejahtera (KPM). Hal ini diatur dalam Permensos No. 11 Tahun 2018 tentang Program Bantuan Non Tunai dan PERPRES RI No. Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pendapatan dan Kementerian Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Bina Usaha Program Koperasi Elektronik "Warung Royong Kelompok Usaha Bersama Keluarga Harapan". (Nirfalia, 2022:20)

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Pada tahun 2017, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Pangan Sejenis (BPNT). Bantuan sembako (bpnt) yang diterima dari anggaran pusat atau APBN. Kemudian dikelola oleh Kementerian Sosial dan dilimpahkan ke tingkat kabupaten / kota, yang merupakan kewenangan daerah yang memberdayakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada penerima manfaat (KPM) setiap bulannya para keluarga penerima manfaat (KPM) menerima pada mulanya senilai Rp.110.000/ KPM, kemudian mengalami 2 kali kenaikan yakni Rp 150.000 dan sekarang ini sebesar 200.000/KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan bahan pangan ditempat yang telah bekerjasama dengan himpunan bank negara (Himbara) yang biasa disebut e-warung (suci Megawati, 2020).

### **Penerima Manfaat**

Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program BPNT dan ditetapkan oleh KPA di Kementerian Sosial. DPM program BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui aplikasi SIKS-NG ([https://kemensos .go.id](https://kemensos.go.id)) menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). Data Penerima manfaat (DPM) program BPNT yang telah diperiksa dan difinalisasi oleh Pemerintah Daerah serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.

### **Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran dana bantuan program BPNT kepada KPM adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan desain seperti di bawah ini.

### **E-Warung**

E-Warung (warung elektronik gotong royong) tidak hanya sebagai tempat penyaluran bantuan sosial membeli kebutuhan bahan pokok, E-warung juga berfungsi sebagai mini automatic teller machine (ATM) yang melayani pencairan belanja non tunai, buka tabungan, setoran dan tarik tunai, transfer, pembayaran listrik, telpon, BPJS, PAM, cicilan, tiket, token listrik bahkan pulsa.

Bank Penyalur bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-Warung dengan memperhatikan jumlah dan sebaran KPM di desa/kelurahan. Penetapan e-Warung sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b. Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c. Menjual bahan pangan sesuai harga pasar.
- d. Memiliki pemasok yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- e. Dapat diandalkan untuk menyediakan produk bahan pangan yang secara konsisten berkualitas dengan harga yang kompetitif kepada e-Warong.
- f. Dapat memastikan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan kepada e-Warong.
- g. E-Warong dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan bahan pangan terjamin serta memenuhi prinsip program.
- h. Dapat melayani KPM dan non-KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- i. Memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas.
- j. Setiap perorangan atau badan hukum diperbolehkan menjadi e-Warong yang melayani program Sembako, kecuali Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta unit usahanya, Toko Tani Indonesia, ASN, pegawai HIMBARA dan Tenaga Pelaksana Bansos Pangan.
- k. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-Warong maupun pemasok e-Warong.

### **Pengertian Kemiskinan**

Secara harfiah Kamus besar Bahasa Indonesia, miskin itu berarti tidak berharta benda. Miskin juga berarti tidak mampu mengimbangi tingkat kebutuhan hidup standard dan tingkat penghasilan dan ekonominya renda. Secara singkat kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (Tria & Praja, 2021, 4)

Kemiskinan merupakan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Bank Dunia mengartikan kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain. J. Friedman. (Haryati Roebyantho, dkk. 2019). Menurut Sar A. Levitan dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasi dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasi menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara tertentu dan mudah dengan masyarakat lain, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

### **Ciri-ciri Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik, dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang publik dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin (Suharto, 2009) yaitu :Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar:

- a. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental.
- b. Tidak mampu berfungsi sosial.
- c. Rendahnya sumber daya manusia.
- d. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun masa.
- e. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
- f. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain).
- g. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.

### **Faktor Penyebab Kemiskinan**

1. Kemiskinan Natural Kemiskinan Natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai

baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan atau walaupun mereka ikut serta dalam pembangunan mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997) kemiskinan Natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, lanjut usia, atau karena bencana alam, kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1997) disebut sebagai “persisten poverty”, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada Jurnal Governance (1), 2, 2021 7 umumnya merupakan daerah yang kritis sumber daya alamnya atau daerah yang terisolasi.

2. Kemiskinan Kultural Kemiskinan Kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang di sebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang di pakai secara umum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Baswir (1997) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, apatis dan sebagainya.
3. Kemiskinan Struktural Kemiskinan Struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Menurut Baswir (1997) munculnya kemiskinan struktural disebabkan oleh adanya upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakannya bermacam-macam program dan kebijakan namun, karena pelaksanaannya tidak seimbang. Pemilik sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan masyarakat yang timpang. Menurut Kartasasmita (1997) hal ini disebut “accident poverty” yaitu kemiskinan karena dampak dari satu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **Analisis Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui Metode e-Warung Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Padang Ulak Tanjung diamati melalui aspek-aspek sebagai berikut :**

Model implementasi kebijakan yang bersifat top-down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dikenal dengan “direct and indirect impact on implementation” terdapat empat aspek - aspek yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu :

1. Komunikasi  
Komunikasi merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan public. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik.
2. Sumber Daya  
Sumber Daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan sarana untuk melaksanakan kebijakan . tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya.
3. Disposisi  
Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksana kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan.
4. Birokrasi  
Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi - organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan – keterangan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dan dokumentasi yang lengkap dan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah melalui:

- a) Observasi  
Observasi yaitu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap sebuah objek penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan sehingga memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b) Wawancara  
Penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara secara langsung (tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal) kepada semua informan yang terkait. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan pertanyaan yang sama kepada setiap informan satu dengan yang lainnya
- c) Dokumentasi  
Dokumentasi ialah pencatatan dokumen dan data yang berhubungan dengan penelitian. Data berfungsi sebagai bukti dari hasil wawancara. Kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menelusuri dan mempelajari dokumen – dokumen yang sudah ada.

### Teknik analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, Teknik analisis data yang dilakukan ialah teknik analisis data kualitatif yang dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, menyusunnya dalam satu–satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta menafsirkan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian ( Moleong, 2006:247). Menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2007:2430) ada dua macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data  
Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dalam penelitian dengan mencari pola dan temanya hingga memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data  
Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwa penyajiandata adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Mekanisme pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) melalui Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilakukan melalui tahapan: (1). Registrasi atau pembukaan rekening (2). Edukasi dan sosialisasi (3). Penyaluran (4). Pembelian barang/pencairan

1. Registrasi atau pembukaan rekening  
Registrasi atau pembukaan rekening keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) meliputi pembukaan rekening secara kolektif, Pencetakan kartu, Aktivasi, dan distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS).
2. Edukasi dan sosialisasi  
Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana seperti dari Kementerian Sosial, Pendamping, Kecamatan atau Kelurahan, dan Aparat Desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang dilaksanakan secara tatap muka dengan materi atau sosialisasi tentang apa itu program bantuan pangan non tunai (BPNT), tujuan dan manfaat program BPNT, tata cara penggunaan kartu KKS, manfaat menabung dan perencanaan keuangan, tata cara penyampaian pengaduan dan kebijakan dari program BPNT.
3. Penyaluran  
Proses penyaluran program BPNT dilaksanakan oleh bank penyalur kepada rekening e-wallet keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan non tunai (BPNT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan sebesar 110.000/bulan pada tahap awal pembentukan program BPNT kemudian terjadi kenaikan sebesar 150.000/bulan dan sekarang menjadi 200.000/bulan. Kemudian penyalur menyediakan peralatan kepada pelaksana penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) E-Warung yang meliputi mesin mini ATM dan kertas cetak reksi.
4. Pembelian barang/tahap pencairan  
Pembelian barang/ tahap pencairan para KPM langsung datang ketempat agen pelaksana atau E-Warung dengan membawa kartu ATM merah putih kemudian dilakukan pengecekan saldo oleh agen E-Warung melalui mesin mini ATM jikalau terdapat saldo maka para KPM bisa membeli sembako berupa beras dan telur.  
Bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada penerima manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di E-Warung yang telah berkerjasama bank himbara. Dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) didesa padang ulak tanjung yang dilihat menggunakan teori implementasi oleh George C. Edward III dengan aspek -aspek (1). Kominikasi (2) Sumber Daya yang terbagi menjadi (a). Sumberdaya Manusia (b). Sarana dan Prasarana (3). Disposisi atau Sikap Para Pelaksana (4). Struktur Birokrasi.

Berdasarkan pengamatan langsung kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM ( keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan. Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dengan agen E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

### **Pembahasan**

Berdasarkan pengamatan langsung peneliti kelokasi penelitian dan hasil wawancara dengan agen pelaksana program BPNT dan Pemerintah Desa tampak struktur Birokrasi dalam program BPNT sudah baik. Karena sudah menjalankan standar SOP (standar oprasional prosedur ) yang baik. Dalam hal pelaksanaan, melalui struktur birokrasi yang jelas maka SOP akan terlaksana dengan baik. Adapun pada proses pelaksanaan penyaluran program BPNT didesa padang ulak tanjung, semua pihak ikut serta dalam membantu berjalannya penyaluran tersebut baik dari pihak pemerintah setempat, tim koordinasi dan agen pelaksana. Semua pihak sudah menjalankan tugasnya masing-masing berdasarkan aturan yang ada dan saling menjalin komunikasi terkait proses penyaluran BPNT di desa padang ulak tanjung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Padang Ulak Tanjung kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu Tengah, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mendapatkan kesimpulan

bahwa proses pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui metode E-Warung dalam menanggulangi kemiskinan sudah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan aturan yang dilihat dari aspek komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian kelokasi penelitian dan wawancara dengan para KPM ( keluarga penerima manfaat). Masih ada kendala yang dihadapi pada tahap komunikasi atau sosialisasi karena masyarakat masih perlu adanya pengawasan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan bantuan, Dan sarana dan prasarana didesa padang ulak tanjung yang digunakan dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (bpnt) masih sangat kurang serta jarak antar rumah KPM dan E-Warung jauh sehingga menyebabkan KPM merasa kesulitan pada saat pengambilan bantuan.

### Saran

Pemerintah, masyarakat dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk melakukan pertemuan setiap bulannya dengan keluarga penerima manfaat (KPM) guna untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat penerima bantuan lebih memahami tentang prosedur pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT). Dan perlu juga ditambahkan pada sarana prasarana agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam proses pengambilan bantuan sehingga bisa menanggulangi kemiskinan yang ada di desa padang ulak tanjung kecamatan talang empat kabupaten Bengkulu tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suharto. 2005:156 *membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, yogyakarta
- Undang – undang 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 *tentang fakir miskin dan anak- anak terlantar dipelihara oleh negara*
- Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Megawati Suci (2020). *Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan dikabupaten mojokerto*. 1 vol 2 no (3)
- Dunn, William N., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society.
- Edward III, 1980. *Direc and indirec impact on implementation*.
- Nurfalia (2020:20). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dengan Metode E-warung*. Evaluasi, Pelaksanaan Program BPNT, Kemiskinan. 1 vol 2 No 3.
- Reobyantho haryati (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non- Tunai ( Bpnt ) dengan Metode E-Warung di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 ( Studi Kasus di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro )*. 2(2).
- Kecamatan, T., & Kota, W. (2020). *Evaluasi program bantuan pangan non tunai kepada keluarga penerima manfaat di kelurahan mahakeret barat dan kelurahan mahakeret timur kecamatan wenang kota manado*. 4(4), 1–9.
- PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI ( BPNT ) ANTARA HARAPAN DENGAN KENYATAAN ( Studi Pada Masyarakat Desa Ulak Ata Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara ) Skripsi WULAN SEPTIRIANA Prodi : Pemikiran Politik Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN*. (2022).
- Publik, A., Sosial, F. I., & Gorontalo, U. N. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) di Kelurahan Heledulaa Utara , Kecamatan Kota Timur*. 2(8), 3362–3372.
- Rusli dkk, 1995:51-52 *Analisis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Djaenal Rifani Dkk, 2021, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Studi Ilmu Politik Vol 1 No 2.
- Kawung M Alive DKK, 2020, *Evaluasi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT)Kepada Keluarga Penerima Manfaat dikelurahan Mahakare kota Manado*. Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 4
- Mukminatul Diah, 2020, *Analisi Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan*

*Kesejahteraan Masyarakat. Manajemen Bisnis Vol 2 No 1*  
Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendekatan kuantitatif dan kualitatif, bandung*